

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KRISIS UTANG YUNANI PASCA BERGABUNG DENGAN ZONA EURO TAHUN 2008-2011

Maysarah¹

Abstract: *This research aims to describe the factors causing the debt increase of Greece after joining the Euro Zone in 2008-2011. This type of research is descriptive, followed by the type of data secondary that obtained through library research and internet. Furthermore, the analysis technique used is qualitative content analysis in relation to the conceptual framework, the author is using Contagion Theory, Concept of Foreign Assistance, Structural Adjustment Theory, and Theory of Optimum Currency Area. These theories is used to answer the factors that led to the increase of the Greece debt crisis after becoming member of the Euro Zone in 2008-2011. The results of this study shows that there are some factors causing the debt increase of Greece after joining the Euro Zone in 2008-2011, which are the global financial crisis which contagion to the financial crisis in Europe and affecting the increase of Greek debt, the presence of foreign aid also provides an unproductive motivation in managing finances because it is allocated to the import consumption sector, then Troika management conditions worsened the Greek economy and caused the debt increased, and the weakening of the single currency provides risks to economic growth including the value of debt.*

Keywords: *Debt Crisis, Euro Zone, Greece*

Pendahuluan

Sejak tahun 1992 negara-negara di Eropa telah membahas suatu integrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian serta melancarkan aktivitas perdagangan bebas di Eropa (Immanuel et.al, 2016). Dengan ini secara otomatis membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah bagi konsumen, dan membantu para pelaku bisnis agar terhindar dari kerugian yang berhubungan dengan nilai tukar. Integrasi ekonomi tersebut diwujudkan dengan cara menerapkan mata uang tunggal euro.

Dalam penerapannya, mata uang tunggal euro telah diadopsi tahun 1995 di Madrid. Tahun 1998 dikalkulasi dalam satuan unit, kemudian 1999 mulai diproduksi dan diperkenalkan. Namun penggunaan euro mulai diadopsi secara internasional pada tahun 2002. Sementara itu untuk pengelolaan mata uang euro, penetapan nilai suku bunga, dan pengambilan kebijakan moneter lainnya di Eropa maka Bank Sentral Eropa yang berbasis di Frankfurt, Jerman, ditunjuk sebagai pengatur keuangan di *Zona Euro* (aei.pitt.edu, 2013).

Wilayah pengguna mata uang tunggal euro disebut *Zona Euro* atau *Eurozone*, merupakan kumpulan dari negara-negara di kawasan Eropa untuk melakukan integrasi perekonomian dan menjalankan tujuan dari penerapan mata uang tunggal euro. Yunani merupakan negara ke-12 yang bergabung ke dalam *Zona Euro*. Sebelum bergabung, Yunani telah mengalami peningkatan utang yang mencapai hampir 70% tahun 1980-an dan melampaui PDB atau nilai penjualan barang dan jasa. Akibat dari tingginya jumlah utang tersebut, membuat Yunani melakukan pendaftaran tahun 1991 untuk bergabung ke dalam *Zona Euro* dengan harapan dapat mentsabilkan keuangannya, sehingga secara otomatis dapat mengurangi beban utang yang dimiliki (europia.eu, 2017). Namun pada

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : mae9sarah@yahoo.com

tahun 1998 Yunani dinyatakan gagal bergabung dikarenakan tidak dapat memenuhi target inflasi, defisit, dan nilai utang dari ketetapan *Maastricht*. Sementara perhitungan dalam akhir tahun 1998 inflasi dan defisit Yunani mencapai sebesar 5%.

Meskipun gagal di tahun 1998 karena tidak dapat memenuhi syarat dari perjanjian *Maastricht*, Yunani tetap berupaya untuk dapat menjadi anggota *Zona Euro*. Salah satu cara yang dilakukan adalah memperbaiki perekonomiannya dengan program penghematan anggaran. Upaya ini berdampak positif sehingga Yunani dapat dianggap memenuhi syarat atau kriteria untuk menjadi anggota yakni defisit anggaran mencapai 3% dan inflasi menjadi 2,1% di bawah 3% dari ketetapan *Maastricht* (Barrell, 2008). Dengan syarat-syarat dari *Maastricht* yang telah terpenuhi, akhirnya Yunani resmi bergabung dengan *Zona Euro* pada tahun 2001. Terkait hal ini juga dapat disimpulkan bahwa Yunani dapat membuat perekonomiannya menjadi lebih baik secara mandiri.

Dengan perekonomian yang sudah membaik, Yunani tetap berkeinginan menjadi anggota di *Zona Euro*. Hal ini dikarenakan Yunani juga mengharapkan bantuan dana dari *Zona Euro* agar keuangan tersebut dapat digunakan untuk membayar cicilan utang dan mempercepat pembangunan ekonomi. Pasca awal bergabung dengan *Zona Euro* akses pinjaman dana segar dari negara anggota yang kuat seperti Jerman dan Perancis dibuka untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan ini Yunani dengan cepat memanfaatkan peluang dan menggunakan pinjaman tersebut (Barrell, 2008).

Lembaga debitur tidak khawatir karena mereka percaya pada kinerja keuangan dan stabilitas perekonomian Yunani setelah berupaya memperbaiki perekonomiannya untuk bergabung dengan *Zona Euro*. Terlebih dari itu *credit rating* dianggap masih dalam keadaan yang baik. Namun krisis finansial dalam satu integrasi keuangan atau mata uang regional dimasa depan memungkinkan dalam mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sehingga untuk dapat terhindar dari permasalahan finansial ini, diperlukan adanya kebijakan yang tepat untuk menangkal krisis keuangan yang terjadi suatu saat (Furtula et.al, 2017).

Selama periode 2001-2007 krisis utang Yunani pernah mengalami penurunan. Setelah ditotalkan pertahunnya penurunan utang tersebut mencapai 3,4% dari tahun 2002-2003. Meskipun begitu, utang Yunani juga mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Peningkatan paling tinggi hanya 4.5% tepatnya dari tahun 2004-2005. Namun pada tahun 2008 krisis utang mulai meningkat tinggi lagi dan hal ini belum pernah terjadi sebelum Yunani menerapkan mata uang euro di tahun 1980-2000. Perubahan utang di tahun 2008 tersebut yakni 109.4%, dan 2009 menjadi 126.7%, kemudian 2010 bertambah 146.2%, hingga sampai dengan 2011 mencapai 172.1%. Apabila ditotalkan pertahunnya kenaikan yang paling tinggi mencapai 25.9% di tahun 2011 (tradingeconomis.com, 2019).

Setelah mengganti mata uangnya dengan euro, Yunani dapat menerima berbagai manfaat terutama terhadap kestabilan keuangan yang dapat membantu penurunan utangnya. Akan tetapi dalam sistem mata uang tunggal terdapat resiko bagi negara yang menerapkannya. Perekonomian atau nilai utang yang stabil dikarenakan adanya faktor nilai uang yang kuat, namun apabila nilai mata uang melemah, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah nilai utang juga akan terpengaruh. Hal ini akan dapat menimbulkan sebuah krisis utang yang tinggi di setiap negara yang menggunakan mata uang tunggal (Neuby et.al, 2017).

Dengan meningkatnya utang Yunani yang signifikan di tahun 2009, maka tahun 2010 Bank Sentral Eropa memutuskan meminta bantuan kepada IMF untuk

diberikan dana talangan kepada Yunani agar dapat mengurangi krisis utang yang dihadapinya. Meskipun telah menerima dana talangan, Yunani tetap belum mampu mengurangi krisis utangnya hingga tahun 2011.

Kerangka Dasar Teori Dan Konsep

Teori Contagion

Contagion atau penularan juga mengacu pada transmisi krisis (guncangan) dari satu ekonomi ke ekonomi lainnya. Dalam penelitian yang ditulis oleh Lilian Cheung, Chi-sang Tam dan Jessica Szeto yang berjudul “*Contagion of Financial Crises: A Literature Review of Theoretical and Empirical Frameworks*” mengenai keterkaitan keuangan atau *financial linkage*, mereka menjelaskan bahwa hubungan perdagangan dapat membantu menjelaskan penularan antara ekonomi yang terkait erat. Terkadang hubungan keuangan mungkin merupakan saluran yang lebih penting. Krisis keuangan dalam satu perekonomian dapat menyebabkan pengurangan dalam kredit perdagangan, investasi asing langsung, dan arus modal lainnya. Ada hubungan keuangan yang *contagion* atau menular, dan sebagian ditentukan oleh tingkat integrasi pasar keuangan antara ekonomi yang bersangkutan.

Terdapat 3 saluran yang memungkinkan untuk mentransmisikan sebuah guncangan dalam hubungan keuangan atau *financial linkage* yakni:

a. *Common Creditor*

Guncangan dapat dimulai dengan bank internasional yang kemudian merambah ke sektor riil ekonomi lain melalui pengurangan pinjaman oleh bank. Ini telah terjadi dalam krisis saat ini dengan banyak bank di negara-negara industri menarik kembali pinjamannya di pasar setelah mengalami kerugian dalam investasi sekuritas mereka.

b. *Interconnected lenders*

Hubungan keuangan melalui penularan yang ditransmisikan dapat menjadi rumit di hadapan rantai kreditur yang saling berhubungan. Berdasarkan model penularan keuangan yang berdampak domino ini, sebagai contoh jika bank internasional, katakanlah Bank A, telah meminjam dari Bank B di negara lain, dan Bank B meminjam dari Bank C, maka *default* atau kegagalan A berdampak ke B, yang kemudian dapat berdampak ke Bank C.

c. Interaksi di bawah sistem keuangan yang berbasis pasar

Dalam sistem keuangan berbasis pasar modern, penularan dapat ditularkan melalui perubahan harga dan resiko yang terukur dan ditandai pada pasar modal dari lembaga keuangan. Ketika neraca ditandai ke pasar maka perubahan aset akan segera tercermin di neraca dan ini akan memicu respon dari peserta pasar keuangan. Bahkan jika eksposur tersebar luas diseluruh sistem keuangan, dampak potensial guncangan dapat diperbesar berkali-kali melalui perubahan harga pasar.

Dari 3 pemikiran mengenai *contagion* tersebut terdapat 2 komponen yang berperan dalam mengkaitkan ke dalam penelitian ini. Komponen ini adalah *common creditor* yaitu krisis finansial atau guncangan ekonomi negara lain dapat menular dan mempengaruhi pengurangan sektor riil ekonomi karena terjadi penarikan kembali pinjaman bank di pasar. Kemudian penularan juga terjadi karena adanya perubahan harga di pasar modal dari lembaga keuangan.

Konsep Bantuan Luar Negeri

Menurut Bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep, juga suatu teori yang berhubungan dengan mengalirnya modal atau nilai kebendaan atau jasa-jasa kepada

pihak lain di luar negeri dengan tujuan membantu atau dalam rangka kerjasama satu sama lain untuk tujuan tertentu. Ini berkenaan dengan proses-proses ekonomi dan politik yang sukar terpisahkan di antara keduanya (Yanuar, 2017).

Adapun pengertian bantuan luar negeri menurut Tadaro adalah bantuan luar negeri yakni mencakup bantuan militer yang sifatnya bukan komersial dan bukan konsesional. Oleh karena itu bantuan luar negeri meliputi semua peminjaman konsesional dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang dan barang, yang secara umum ditujukan untuk mengalihkan sumber-sumber dari negara kaya ke negara-negara Dunia Ketiga (Yanuar, 2017).

Sementara itu terdapat 2 motivasi dalam bantuan luar negeri. Motivasi tersebut yakni motivasi pemberian bantuan luar negeri dan motivasi penerimaan bantuan luar negeri. Dalam motivasi bantuan luar negeri yang terkait dalam penelitian ini adalah motivasi penerimaan bantuan luar negeri, dimana dalam menerima bantuan tersebut terdapat efek positif dan efek negatif. Efek positifnya adalah bantuan luar negeri merupakan intensif yang mendorong diservikasi pembangunan, mengatasi kemacetan-kemacetan pembangunan, dan peristiwa-peristiwa alamiah seperti bencana alam dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Sedangkan efek negatifnya adalah terjadi krisis pinjaman yang menghambat kelancaran dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan ekonomi moneter terhadap luar negeri ternyata juga merupakan efek negatif dari bantuan luar negeri. Ketergantungan tersebut bahkan dapat membawa dampak terhadap krisis nasional (Yanuar, 2017).

Alasan suatu negara mendapatkan bantuan luar negeri adalah agar mendorong sebuah pembangunan ekonomi. Namun membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan sebuah bantuan luar negeri akan berhasil apabila didorong dengan motivasi yang produktif atau menghasilkan. Akan tetapi bantuan luar negeri dapat berdampak negatif serta menimbulkan krisis terhadap pinjaman bilamana negara hanya mengandalkan bantuan luar negeri dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya yang tidak menghasilkan dana baru juga tidak menguntungkan. Sehingga negara akan mengalami ketergantungan dengan bantuan luar negeri. Jika terjadi permasalahan dalam pasar modal, hal ini tentunya akan mempengaruhi krisis pinjaman yang lebih dalam.

Teori Structural Adjustments

Menurut Abourharb dan Cingraneli, *structural adjustments* adalah perubahan kebijakan yang diterapkan oleh *International Monetary Fund* atau IMF dan Bank Dunia. Perubahan kebijakan ini adalah kondisi (persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman baru dari IMF atau *World Bank*, atau agar memperoleh suku bunga yang lebih rendah atas pinjaman yang ada. Persyaratan diterapkan untuk memastikan bahwa uang yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan tujuan dari keseluruhan pinjaman. *Struktural Adjustment Programs* (SAPs) dibuat dengan tujuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal negara peminjam. Bank dari negara peminjam menerima besar pinjaman tergantung dari jenis kebutuhan. SAPs seharusnya memungkinkan perekonomian negara-negara berkembang untuk menjadi lebih berorientasi pasar. Hal ini kemudian memaksa mereka untuk menjadi lebih berkonsentrasi pada perdagangan dan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Dengan persyaratannya, SAPs umumnya menerapkan program dan sebuah kebijakan 'pasar bebas' (Abourharb et.al, 2007).

Program ini termasuk perubahan internal (terutama kondisi privatisasi dan deregulasi) maupun perubahan eksternal, terutama pengurangan hambatan dalam

perdagangan. Negara-negara yang gagal untuk menetapkan program-program ini dapat dikenakan disiplin fiskal parah. Para kritikus berpendapat bahwa ancaman keuangan untuk negara-negara miskin sama saja dengan pemerasan dan negara-negara miskin tidak punya pilihan selain mematuhi.

Kondisi privatisasi atau pelepasan usaha milik negara ini dapat menimbulkan pengangguran besar sehingga mengakibatkan kurangnya penghasilan dan pajak penerimaan oleh negara yang akan memperburuk perekonomian serta mempengaruhi krisis pinjaman menjadi semakin dalam akibat kurangnya dana untuk membayar utang.

Teori Optimum Currency Area

Teori OCA (*Optimum Currency Area*) memfokuskan perhatian pada berbagai kriteria yang harus dipenuhi sebelum negara-negara dalam satu kawasan bergabung membentuk suatu *monetary union*. Kriteria itu disusun sedemikian rupa sehingga memaksimalkan manfaat melakukan integrasi moneter (Girsang, 2011).

Arifin (2007) menyebutkan kriteria-kriteria untuk mencapai OCA sangat beragam, tetapi dapat digolongkan dalam empat kriteria, yaitu:

1. Interpendensi dibidang perdagangan. Negara-negara yang berintegrasi cukup kuat di bidang perdagangan internasional akan mendapatkan manfaat yang relatif besar apabila berada dalam payung OCA, mengingat keseragaman nilai mata uang akan menghemat biaya transaksi dan mengurangi resiko yang berkaitan dengan penggunaan mata uang berbeda. Oleh karena itu, saling ketergantungan dibidang perdagangan merupakan kriteria yang sangat penting bagi pembentukan OCA.
2. *Symmetry of shocks*. Kriteria ini mengacu kepada kemungkinan bahwa negara-negara dengan siklus bisnis yang simetris mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi anggota OCA. Sebagaimana disebutkan oleh Mundell (1961) bahwa suatu kawasan dengan respon atau *shock* yang simetris, memungkinkan untuk mengambil kebijakan moneter yang sama.
3. Mobilitas produksi. Apabila mobilitas tenaga kerja dan modal memungkinkan, maka *shock* di dalam negeri di redam tanpa menimbulkan biaya penyesuaian yang tinggi. Oleh karena itu, negara-negara yang ingin bergabung ke dalam *monetary union* haruslah membebaskan arus lalu lintas faktor produksi antar negara. Namun demikian, ada pendapat yang mengatakan bahwa kawasan mata uang tunggal dengan format OCA itu sendiri dapat mempengaruhi faktor produksi. Dengan demikian mobilitas faktor produksi ini dapat dianggap sebagai *ex post facto* dalam pemenuhan kriteria pembentukan mata uang tunggal.
4. Konvergensi kebijakan makroekonomi. Kriteria ini penting mengingat apabila negara-negara dalam suatu kawasan mempunyai sasaran kebijakan berbeda, maka kepentingan mereka boleh jadi bersebrangan satu sama lain dalam menghadapi suatu tekanan eksternal yang sama. Dengan demikian sistem koordinasi untuk stabilitas nilai tukar dapat dengan mudah goyah.

Jika mengacu kepada struktur Mongeli (2002) perkembangan teori OCA dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu:

1. Fase awal (1960-an – awal 1970). Fase ini dikarakteristikan oleh kondisi dunia yang umumnya menganut nilai tukar tetap (*Bretton Wood*) dan pengwasan devisa. Di sini timbul ide-ide yang mempertanyakan manfaat dan biaya antar rezim nilai tukar tetap dan nilai tukar fleksibel, serta kemungkinan integrasi ekonomi (khususnya Eropa). Dari dua periode ini lahir kriteria yang harus dipenuhi agar manfaat integrasi ekonomi dan penyatuan mata uang optimal.

2. Fase rekonsiliasi (1970-an). pada fase ini, teori OCA dikembangkan dengan menggunakan kerangka berfikir manfaat versus biaya (Mundell, 1973 dan Corden, 1972). Jika suatu wilayah atau sekelompok negara tersebut teridentifikasi OCA, maka dapat melakukan penyatuan mata uang (kebijakan moneter bersama). Implikasi semacam ini akan memberikan suatu manfaat tetapi juga memiliki suatu biaya.

Dalam keempat kriteria oleh Arifin dijelaskan bahwa suatu negara yang memiliki siklus bisnis yang simetris dapat menerapkan mata uang tunggal. Namun suatu kawasan yang memiliki respon atau *shock* yang simetris memungkinkan untuk mengambil kebijakan moneter yang sama. Contohnya jika bank sentral menaikkan suku bunga sebagai respon atas inflasi dikawasan itu maka respon negara-negara anggota harus sama, jika tidak biaya yang dikeluarkan lebih beragam.

Hal diatas juga didukung struktur teori OCA oleh Mongeli terkait fase rekonsoliasi yang menjelaskan bahwa suatu negara yang teridentifikasi OCA dapat melakukan penyatuan mata uang tunggal. Namun dalam penyatuan mata uang tersebut secara otomatis harus merelakan kebijakan moneter mereka diganti dengan kebijakan moneter baru yang selaras. Sebagai contohnya adalah *Zona Euro*, yakni bagi negara-negara yang akan menerapkan euro harus mengganti kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Sentral Eropa.

Namun dalam kriteria yang ditulis Arifin mengenai konvergensi kebijakan makroekonomi bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Dalam artian bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Apabila terjadi tekanan eksternal maka hal ini akan dapat mempengaruhi sistem koordinasi untuk stabilitas nilai tukar mata uang.

Sama halnya dengan *Zona Euro* bahwa kawasan tersebut terdiri dari beberapa negara dengan kebijakan dan karakteristik yang berbeda. Dengan terjadinya guncangan ekonomi dari krisis global tahun 2008, maka setiap negara anggota akan terfokus pada penanganan masalah di negaranya saja, sehingga memunculkan kurangnya sistem koordinasi untuk melihat stabilitas nilai tukar. Penurunan stabilitas mata uang merupakan suatu konsekuensi besar dalam sebuah mata uang tunggal, mengingat banyak negara yang menerapkannya. Kemudian penurunan nilai mata uang juga akan mempengaruhi beberapa aspek ekonomi lain seperti inflasi, pendapatan, nilai utang, serta ketidakpastian dalam pasar.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, dimana penulis menggambarkan dan menjabarkan faktor penyebab meningkatnya krisis utang Yunani pasca bergabung dengan *Zona Euro* tahun 2008-2011. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder dimana data diperoleh dari beberapa *literature* yakni buku, jurnal dari situs-situs internet, dan sebagian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dan saling berkaitan serta sumber-sumber terpercaya lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu data diambil dari buku, situs-situs internet, dan jurnal-jurnal terpercaya yang kemudian diolah ke dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif *content analysis*, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam buku dan media massa terkait dengan topik yang dibahas. Penulis berupaya untuk menganalisis dan mencari makna dari data-data yang dikumpulkan, dengan cara

mencari pola, tema, hubungan persamaan, dan hipotesis yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat sementara.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Krisis Utang Yunani Pasca Bergabung dengan Zona Euro di Tahun 2008-2011

A. Terjadinya Krisis Finansial Global Menyebar Menjadi Krisis Finansial di Eropa dan Mempengaruhi Terhadap Peningkatan Utang Yunani

Tantangan serius pertama di *Zona Euro* datang dari krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini bermula dari kredit perumahan Amerika Serikat yang bermasalah dan menyebar (*contagion*) terhadap perekonomian negara maju di Eropa dan menimbulkan kerugian. Hal ini dikarenakan Eropa memiliki hubungan perdagangan yang juga merupakan investor portofolio terbesar di bursa saham Amerika Serikat. Selain itu, kerugian juga dialami oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang selama ini menjadi sumber modal asing bagi negara-negara berkembang di Eropa. Akibatnya, penyebaran krisis finansial ini mengakibatkan pengurangan pada investasi asing langsung dan arus modal lainnya yang dilakukan oleh investor sehingga membuat nilai mata uang euro pun melemah (Furtula et.al, 2017).

Dampak krisis global bagaikan air deras yang mengalir dari keran yang terbuka, menjalar ke berbagai negara dalam sekejap, dan menimbulkan terjadinya aksi *flight to quality* yang dilakukan oleh pelaku pasar semakin marak sehingga memicu *capital outflow*. Aksi tersebut akhirnya menyebabkan melemahnya nilai mata uang euro juga mata uang di negara Eropa lainnya, serta semakin membuat kondisi pasar modal tertekan. Melihat kondisi ini pemerintah negara-negara di Eropa mengumumkan aset penyelamatan perbankan dalam miliaran dolar. Pemerintah Inggris mengeluarkan dana sebesar 50 miliar Poundsterling setelah BoE (*Bank of England*) menyuntikan dana sebesar 10 miliar Poundsterling untuk menjaga likuiditas akibat penarikan uang secara besar-besaran (*bunk run*). Diikuti oleh pemerintah Jerman yang menyiapkan dana sebesar 50 miliar euro untuk menyelamatkan *Hypo Real Estate Bank*. Lebih lanjut 4 bank sentral di kawasan Eropa, ECB, BoE, Swedia dan Swiss, bersama-sama menurunkan suku bunga sebesar 5% untuk melonggrakan likuiditas (Arafat, 2009).

Kurangnya koordinasi dan bentuk-bentuk kebijakan yang diambil oleh negara-negara maju di Eropa menyebabkan langkah penghentian krisis tidak efektif. Harga-harga saham terus menurun, investasi bisnis juga mengalami penurunan, dan investasi di sektor perumahan ikut mengalami kejatuhan, terutama negara-negara yang mengalami gelembung sektor properti, seperti di Inggris. Penyebaran krisis yang bermula menghantam perekonomian negara-negara maju di Eropa pun mulai mengancam perekonomian kelompok negara berkembang di kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan akibat ketergantungan berbagai negara tersebut kepada aliran modal asing yang sebagian besar berasal dari negara-negara maju di Eropa, khususnya juga Yunani (Arafat, 2009).

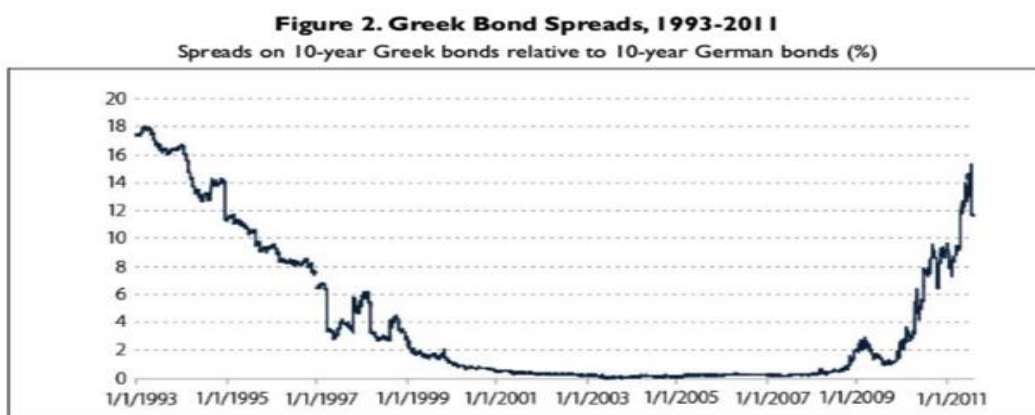
Krisis finansial di Eropa pun berubah menjadi krisis di sektor ril dan akhirnya secara otomatis menyebabkan PDB di Yunani menurun. Hal ini disebabkan Yunani menjalankan aktivitas perekonomiannya dengan mengandalkan investasi dan modal asing. Berkurangnya modal dan investasi akibat krisis finansial juga mempengaruhi penurunan pada siklus bisnis. Sementara itu, siklus bisnis yang menurun akan menimbulkan defisit yang akan menyebabkan penurunan pada PDB rill dan otomatis

menyebabkan rasio utang secara langsung (Arafat, 2009). Dengan penurunan pada pendapatan negara-negara di kawasan euro maka secara otomatis pun akan mempengaruhi PDB pada Yunani. Mengingat mereka memiliki hubungan perdagangan dan juga euro menjadi sistem mata uang yang justru mengikat negara-negara lain di dalam suatu krisis keuangan.

Lebih lanjut efek krisis finansial global terhadap finansial di Eropa yang mengakibatkan pada penurunan PDB dan krisis kepercayaan di pasar uang global atau pasar modal ini melemahkan nilai mata uang euro. Melemahnya nilai mata uang euro dan menurunnya pendapatan di Yunani membuatnya rentan terhadap perubahan kepercayaan investor. Jika investor kehilangan kepercayaan pada kemampuan atau kemauan Yunani dalam membayar utangnya, mereka akan semakin berhenti meminjamkan kepada pemerintahan tersebut. Selain itu, investor pun akan membebankan suku bunga yang lebih tinggi agar terhindar dari kerugian meskipun tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Yunani. Dengan ini, menurunnya pendapatan dan kestabilan euro pun memberi dampak terhadap kurangnya akses modal atau investasi, akibatnya pemerintah akan semakin sulit untuk meminjam dan membayar utang yang sudah jatuh tempo, sementara bunga utang pada setiap tahunnya akan meningkat (Nelson et.al, 2017).

Pada tahun 2009 investor menjadi semakin gelisah dan ketakutan akan kegagalan Yunani dalam membayar utangnya. Para investor akhirnya menuntut tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk membeli dan memegang obligasi Yunani agar menghindari kerugian besar. Hal ini dibuktikan dengan grafik di bawah ini. Sementara itu, mereka juga menaikkan biaya pinjaman Yunani yang memperburuk tingkat utangnya dan menyebabkannya berbelok ke arah *default* (Nelson et.al, 2017).

Grafik 1. Spread Obligasi Yunani 1993-2011



Source: Global Financial Data.

Sumber: Nelson et.al, 2017

Dengan demikian krisis global memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan utang Yunani. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ini bukan hanya mempengaruhi pendapatan Yunani. Akan tetapi kepercayaan investor, tingginya obligasi, dan penurunan nilai mata uang euro yang akan membuat nilai tukar menjadi mengambang pun terjadi. Hal ini akan menyulitkan pemerintah Yunani untuk membayar utang dan bunga yang terus bertambah.

B. Bantuan Luar Negeri Diarahkan Pada Sektor yang Tidak Produktif

Krisis utang Yunani mulai tahun 2008 semakin meningkat karena telah banyak meminjam dana dan sebagian besra pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan impor yang diarahkan pada konsumsi. Lembaga keuangan diseluruh Eropa juga tidak segan untuk memberikan sebuah pinjaman. Dana pinjaman yang tidak produktif tersebut diperparah karena Yunani tidak memilih kesempatan untuk membangun atau memproduksi apapun dengan pinjaman. Yunani hanya bergantung pada sebuah dana atau pinjaman dan tidak dapat secara efektif menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari utang luar negeri untuk meningkatkan daya saing. Akhirnya terjadi penurunan dalam daya saing serta pelemahan ekonomi Yunani yang menunjukkan kinerja ekspor lebih rendah daripada negara-negara Eropa lainnya. Dengan kata lain Yunani mengkonsumsi lebih banyak daripada yang dihasilkan (Ozturk, 2015).

Sementara itu meningkatnya utang Yunani juga ditambah karena investor menarik saham, dana, atau modal, dan menjadikan pinjaman mengering sehingga negara-negara anggota *Zona Euro* akhirnya tidak mampu membayar utangnya. Dengan kondisi keuangan yang mengering dan tidak adanya kemampuan Yunani dalam menghasilkan dana tambahan dari bantuan luar negeri, akhirnya dana cadangan atau simpanan yang tersisa digunakan lagi untuk membiayai keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat (Ozturk, 2015).

Neraca transaksi berjalan berada pada tingkat -7% dari PDB pada tahun 2001 menjadi -15% dari PDB pada tahun 2008 dimasa krisis finansial Eropa. Akan tetapi pada periode berikutnya angka ini menjadi sekitar -10%. Penurunan neraca ini juga akan berdampak pada defisit anggaran yang kemudian akan mempengaruhi terhadap nilai mata uang dan menurunnya cadangan devisa. Dengan menurunnya nilai mata uang secara otomatis akan mempengaruhi nilai utang suatu negara. Meskipun tahun 2009 naik menjadi -10%, akan tetapi angka ini masih tergolong sangat rendah (Dinopoulos et.al, 2017).

Cadangan devisa Yunani menjadi suatu indikator yang penting untuk melihat sejauh mana negara dapat melakukan perdagangan internasional dan menunjukkan kuat lemahnya fundamental perekonomian. Ketersediaan cadangan devisa yang sedikit menyebabkan Yunani tidak mampu melakukan pembayaran internasional. Fenomena yang sering terjadi adalah kurangnya cadangan devisa diakibatkan negara melakukan pinjaman luar negeri dan juga karena lebih tingginya nilai impor daripada nilai ekspor. Dengan kurangnya ketersediaan cadangan devisa Yunani akibat telah banyak melakukan transaksi impor, membuat utang luar negeri akhirnya tidak dapat dibayar sesuai dengan jatuh tempo (ekonomi.bisnis.com, 2013).

Kurangnya kesiapan Yunani dalam mengelola keuangannya dengan bantuan luar negeri yang diterima telah melemahkan mata uang euro. Meskipun begitu, Yunani bukan satu-satunya faktor yang membuat mata uang melemah, melainkan krisis finansial yang terjadi di Eropa turut menjadi arus yang paling besar dalam menyebabkan krisis keuangan tersebut. Jerman yang merupakan negara kreditur terbesar dalam *Eurozone* dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan juga terkena dampak krisis keuangan global dan enggan dalam membantu Yunani. Dengan hal –hal tersebut membuat Jerman berada diantara dua pilihan yang sulit yakni tetap bertahan atau keluar dalam *Zona Euro* (bappenas.go.id, 2011).

Namun untuk menenangkan kondisi keuangan di *Zona Euro* yang memburuk, tahun 2010 ECB dan Komisi Eropa meminta bantuan kepada IMF, sementara itu Jerman juga meminta bantuan kepada Cina untuk membantu Yunani. Bantuan luar

negeri yang diberikan oleh Cina diperkirakan sebesar U.S \$100 miliar, namun hal ini justru menjadi masalah terhadap peningkatan utang negaranya dimana terjadi penumpukan pada bantuan luar negeri. Krisis utang yang lama belum teratasi namun terdapat bantuan dana baru di tengah krisis finansial di Eropa tersebut. Sementara itu, tidak ada pengelolaan yang menghasilkan terhadap pembangunan ekonomi yang akhirnya membuat krisis pada pinjaman atau utang semakin menjadi tinggi.

C. Syarat dalam Pengelolaan Krisis Utang oleh Troika Memperburuk Perekonomian Yunani dan Menyebabkan Utang Semakin Meningkat

Dari tahun 2009 Yunani mulai bekerjasama dengan *Troika* (Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF) hingga tahun 2011 dan menerapkan reformasi jalur cepat. Hal ini dikarenakan berbagai program penanganan krisis yang dilakukan oleh Uni Eropa belum mampu secara tuntas menyelesaikan krisis di kawasan Eropa. Kerjasama ini juga dilakukan karena belum ditemukannya formula kebijakan komprehensif yang disepakati bersama di Uni Eropa khususnya *Zona Euro* dalam menangani krisis utang (Febriyana, 2018).

Jalur cepat yang dilakukan dalam menangani krisis utang di Yunani adalah dibuat keputusan yang melibatkan *Troika*, Gubernur Bank Sentral Yunani, Menteri Keuangan Yunani, dan Perdana Menteri Yunani. Kebijakan tersebut tertuang dalam MEFP (*Memorandum of Economic and Financial Polities*) dan telah melalui proses yang panjang antara Yunani dan *Troika* untuk menentukan pengelolaan krisis. Ketika membuat *Letter of Intent* untuk program pengelolaan krisis dibawah *Stand-By Arrangement* IMF untuk periode 36 bulan, Yunani telah menyiapkan MEFP dan *Technical Memorandum of Understanding* yang sudah dirancang bersama dengan *Troika*. Akan tetapi, karena adanya *Request of Stand-By Arrangement* pada IMF yang tertulis dalam *Letter of Intent*, maka keputusan pengelolaan krisis pada rezim konsorium *Troika* ini didominasi oleh IMF. Sehingga dalam pengelolaan krisis ini merupakan kebijakan yang biasa diterapkan pada negara-negara yang meminta bantuan kepada IMF untuk mengelola krisis (Febriyana, 2018).

Hak serta kewajiban *Troika* dalam mengelola krisis utang Yunani tertuang dalam MEFP. Sementara itu MEFP dijelaskan dalam jawaban IMF atas *Request for Stand By Arrangement* dari Menteri Keuangan Yunani dan Gubernur Bank Sentral Yunani. Dalam kerangka kerjasama yang melibatkan *Troika* ini dalam pengelolaan krisis utang Yunani melibatkan tiga hal, yaitu:

1. Program *Design*

Program yang di desain ini harus mewakili kerangka yang terkoordinasi atas penyesuaian kebijakan dan pendanaan yang didukung oleh Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF. Program diatur dalam Momerandum of Understanding dari IMF dan MEFP (Momerandum of Economic and Financial Policies) juga MoU (Memorandum of Understanding) oleh Komisi Eropa. MEFP ini berfokus pada kebijakan makro ekonomi dan langkah-langkah sktuktural yang dipilih, sedangkan MoU meliputi agenda reformasi sktuktural penuh disepakati antara pemerintah dan Uni Eropa.

2. Program *Monitoring*

Tinjauan IMF atas program pengelolaan krisis berdasar pada kerangka kuartal standar kriteria kinerja dan tolak ukur struktural. Tinjauan Komisi Eropa didasarkan pada penilaian secara keseluruhan terhadap kemajuan agenda struktural dalam

MoU serta terhadap target makro ekonomi. Komisi Eropa melakukan penilaian bersama Bank Sentral Eropa, dan kemudian membuat rekomendasi kepada menteri keuangan *Zona Euro* untuk menyetujui pengeluaran bantuan. Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF mengeluarkan bantuan dengan proporsi 3:8 antara IMF dan mekanisme pembiayaan Eropa.

3. *Financing Arrangement*

Pinjaman Yunani diatur oleh perjanjian tunggal antara Yunani dan negara-negara euro, ditandatangani oleh Komisi Eropa atas nama Eurozone yang mencakup tiga penuh program. Pinjaman memiliki jatuh tempo yang sama dengan pinjaman IMF dengan tingkat suku bunga yang mengambang. Yunani mendapat bantuan *Troika* dengan Komisi Eropa sepanjang periode program.

Namun untuk menerima pinjaman dari *Troika*, Yunani harus melakukan reformasi struktural atau pengetatan fiskal, pemotongan belanja pemerintah, dan menaikkan pajak. Hal ini merupakan syarat bagi Yunani apabila menerima bantuan dana untuk mengatasi krisis utangnya. Sementara itu, tahun 2010 perdana menteri George Papandreou melakukan referendum kepada rakyat Yunani untuk menerima penyelamatan ekonomi yang ditawarkan oleh *Troika*. Namun kondisi ini disikapi negatif oleh masyarakat Yunani (Podaras, 2012).

Perubahan kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan cadangan devisa sekaligus melakukan pemotongan anggaran senilai USD 38 miliar untuk mengurangi defisit dari 3%. Namun rakyat Yunani menentang keras dengan kebijakan tersebut karena mereka menganggap apabila kebijakan tersebut dilakukan, maka akan membuat seluruh surat utang negara tidak berharga dan pemegang surat harus menanggung kerugian yang sangat besar. Krisis yang di tangani oleh *Troika* (Komisi Eropa, Bank Snetral Eropa dan IMF) adalah memangkas upah buruh swasta sebesar 15% dan birokrasi 30%, menaikkan berbagai jenis pajak BBM, memangkas anggaran militer, dan yang terparah adalah dimulainya privatisasi BUMN.

Meskipun masyarakat merespon negatif terhadap syarat dari perubahan kebijakan tersebut, namun Yunani tetap melaksanakannya. Dengan dilaksanakan perubahan kebijakan tersebut akhirnya *Troika* memberikan pinjaman tersebut sebesar 110 miliar euro. Akan tetapi penyelamatan baru yang dilaksanakan berdampak terhadap kondisi yang semakin memburuk. Ini termasuk antara lain meroketnya pengangguran dan pendapatan ril yang menurun. Hal ini diakibatkan kondisi dari privatisasi yang dilakukan oleh Yunani sebagai sebuah perubahan kebijakan untuk menerima bantuan *Troika* tersebut, membuat banyaknya pengangguran dimana perusahaan BUMN harus dikurangi dari 6000 menjadi 2000 perusahaan seperti perbankan dan perkapalan. Hal ini dikarenakan pemerintahan Yunani tidak dapat mengatur sumber daya yang ada diperusahaan tersebut. Hasilnya adalah perusahaan – perusahaan melakukan aksi PHK terhadap para pegawai dan memotong gaji pegawai juga pensiun. Kebanyakan dari para pengangguran itu adalah angkatan muda dengan rentang usia 20-25 tahun.

Dengan tingkat pengangguran yang besar dan daya konsumsi yang tinggi, serta tidak adanya pendapatan negara yang cukup, maka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut menjadi lesu. Indikasi ini tentunya membuat negara semakin kesulitan untuk membayar utang beserta bunganya yang akan jatuh tempo. Kemudian hal tersebut memungkinkan bahwa utang yang tidak terbayar akan membuat bunga utang tiap tahun juga bertambah. Selain itu investor akan kembali meningkatkan suku bunga pada obligasi agar terhindar dari kerugian.

D. Konsekuensi Mata Uang Tunggal di Zona Euro

Mata uang tunggal memberikan manfaat bagi stabilitas nilai tukar dalam hubungan perdagangan. Akan tetapi dalam mata uang tunggal ada konsekuensi yang harus di hadapi oleh negara-negara anggota yang menerapkannya. Salah satu konsekuensinya adalah rentannya terhadap krisis ke arah yang lebih dalam. Apabila terjadi gejolak dalam keuangan, maka hal ini akan berdampak pada kekuatan dari nilai mata uang tersebut yang secara otomatis mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, saldo uang, dan PDB di setiap negara anggotanya. Apabila hal tersebut terjadi maka ini akan berdampak pada rasio utang setiap negara yang menerapkan mata uang tunggal.

Euro merupakan mata uang tunggal dimana setiap negara yang menerapkannya harus merelakan kebijakan moneter mereka dengan mengganti kebijakan dari Bank Sentral Eropa. Apabila suatu negara dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang di buat oleh Bank Sentral Eropa maka perekonomian negara akan aman. Namun apabila tidak dapat menyesuaikan maka yang terjadi adalah perekonomian dapat menurun. Sementara itu, jika terjadi permasalahan dalam keuangan, negara anggota yang memiliki perekonomian kuat tidak akan terpengaruh. Disamping itu, negara yang perekonominya lemah secara langsung akan berdampak pada resiko keuangan yang lebih besar. Dengan demikian, sebuah mata uang tunggal yang diterapkan dengan karakteristik dari negara-negara yang berbeda tentu akan beresiko. Sehingga sebuah mata uang tunggal tidak dapat menjadi jaminan kuat yang efisien (Neuby et.al, 2017).

Ketika terjadi krisis global di tahun 2008 dan menyebar menjadi krisis finansial di *Zona Euro*, hal ini membuat kekuatan dari nilai mata uang euro melemah dan otomatis mempengaruhi tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi juga akan mempengaruhi nilai tukar uang menjadi tidak stabil. Akibatnya rasio utang setiap anggota di *Zona Euro* khususnya Yunani juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan nilai dari euro yang menurun sementara utang yang dibayar tidak menurun (Mursa, 2014).

Sebagai contohnya adalah setelah Yunani menerapkan euro sebagai mata uang negaranya di tahun 2001-2007, dengan nilai mata uang yang stabil dapat membuat rasio utang Yunani dalam keadaan baik bahkan mengalami penurunan. Akan tetapi setelah krisis terjadi dan nilai euro melemah, hal ini justru membuat rasio utang di Yunani bertambah. Apabila nilai euro kuat dan juga terdapat kebijakan yang efisien untuk menangkal krisis terjadi, maka hal ini tidak akan mempengaruhi krisis utang lebih dalam terhadap negara-negara anggotanya.

Dengan menurunnya nilai euro hal ini juga berdampak pada ketidakpastian dalam pasar. Bahkan untuk menghindari kerugian besar para investor menaikkan tingkat suku bunga tahun 2009, dikarenakan kekhawatiran pada ketidakmampuan dalam membayar utang Yunani yang akan jatuh tempo karena menurunnya stabilitas mata uang euro. Hal tersebut menyebabkan kas dari pasar modal terhenti, sementara masih ada utang dan bunganya yang harus dilunasi. Dengan terjadinya resesi keuangan tersebut, aktivitas perekonomian Yunani akan terhambat dan secara langsung akan mempengaruhi PDB mereka (Nelson et.al, 2017).

Dalam sistem mata uang tunggal, setiap negara harus merelakan kebijakan moneternya untuk diganti dengan kebijakan yang selaras dari Bank Sentral Eropa. Setelah krisis global terjadi di tahun 2008, ini mempengaruhi tingkat inflasi di *Zona Euro* menjadi lebih tinggi. Adapun kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sentral Eropa untuk mengendalikan inflasi apabila rendah dari 2 persen, yakni mengambil kebijakan

untuk melonggarkan kebijakan moneter tersebut. Kebijakan tersebut antara lain adalah menurunkan suku bunga, *Targeted Longer-Term Refinancing Operation* (TLTRO), menjalankan stimulus moneter dalam bentuk pembelian sekuritas (obligasi), dan menghimbau bank-bank agar menggiatkan penyaluran kredit.

Namun berbeda apabila terjadi peningkatan pada inflasi, terutama ketika krisis di *Zona Euro* terjadi di tahun 2008. Jika hal ini terjadi maka Bank Sentral Eropa dapat memutuskan untuk mengetatkan kebijakan moneter mereka dengan cara menaikkan suku bunga, memangkas stimulus moneter dengan menghentikan pembelian sekuritas (obligasi), menarik stimulus moneter dengan melakukan penjualan sekuritas (obligasi). Apabila terjadi inflasi tinggi dan bank sentral menaikkan tingkat suku bunga, kemungkinan yang biasanya terjadi adalah apabila bunga naik, nilai uang juga ikut menurun.

Tahun 2010 Bank Sentral Eropa juga menerapkan kebijakan untuk Yunani agar menerima dana talangan dengan syarat harus melakukan pengetatan fiskal. Yunani pun tidak dapat menolak untuk melakukan kebijakan tersebut, karena setiap negara anggota *Zona Euro* harus mematuhi kebijakan moneter dan fiskal yang dibuat oleh Bank Sentral Eropa. Bagi negara-negara kaya seperti Jerman dan Perancis, dengan adanya pengetatan moneter dan fiskal, aktivitas perekonomian mereka tetap akan berjalan karena masih memiliki cadangan keuangan yang kuat untuk membiayai operasional yang sifatnya jauh lebih mahal. Namun dalam kasusnya, Yunani tidak dapat menyesuaikan kebijakan yang di buat oleh Bank Sentral Eropa. Hal ini dikarenakan Yunani tidak memiliki cadangan uang yang cukup, selain itu kebijakan moneter di *Zona Euro* dikendalikan oleh Bank Sentral Eropa yang juga dikendalikan oleh Jerman. Sehingga tidak mengherankan apabila kebijakan moneter di *Zona Euro* jauh lebih baik untuk Jerman daripada Yunani (Klein, 2015).

Permasalahan yang dihadapi Yunani adalah pendapatan, tabungan dan cadangan uang meurun. Sementara Yunani harus melakukan pengetatan fiskal dan memotong subsidi yang membuat aktivitas ekonomi akan terhambat. Masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan pangan, obat, serta kebutuhan hidup lainnya akibat kurangnya pendapatan, dan hal ini membuat masyarakat secara bersamaan menarik dana dari bank yang membuat simpanan bank pun semakin lama akan berkurang. Jika hal tersebut terus-menerus terjadi, negara akan mengarahkan cadangan keuangan yang tersisa untuk operasional negara seperti kehidupan berbangsa, pendidikan, dan kesehatan. Dengan ekonomi yang menurun dan adanya pengetatan pada moneter juga fiskal tersebut secara otomatis membuat utang beserta bunganya tidak akan terbayar, sementara bunga tiap tahun akan bertambah. Sehingga alur dari kebijakan Bank Sentral Eropa memiliki konsekuensi terhadap peningkatan nilai utang.

Bukan hanya alur kebijakan dari Bank Sentral Eropa, akan tetapi mata uang tunggal juga memiliki konsekuensi terhadap peningkatan nilai utang. Tahun 2008-2011 terjadi ketidakstabilan pada mata uang euro akibat krisis global, dimana belum genap dalam hitungan setahun nilai euro mengalami kenaikan akan tetapi bersamaan juga menurun secara drastis (morningstar.com, 2019). Hal ini menjelaskan bahwa terjadi ketidakpastian atau gejolak dalam mata uang tunggal euro (*floating rate*). Namun penurunan drastis pada euro yang terjadi dalam beberapa bulan di tahun 2008-2011 mempengaruhi rasio utang pada Yunani. Sebagai contohnya adalah apabila eksportir Yunani menjual pakaian seharga 10 euro kepada Amerika Serikat, dan nilai uang pada tahun 2008 yakni 1 euro setara dengan 1,3 dollar, maka eksportir tersebut dapat menjual dengan harga sekitar 7,5 dollar. Akan tetapi pada tahun berikutnya nilai 1 euro turun

dan menjadi 1,5 dolar, sehingga eksportir Yunani hanya dapat menerima sekitar 6,5 dollar untuk menjual 1 pakaian, hal ini akan merugikan Yunani.

Sama halnya dengan kasus peningkatan nilai utang Yunani akibat melemahnya euro. Contohnya adalah ketika Yunani memiliki utang sebesar 1 euro yang dipatok dengan dollar senilai 1,54 di tahun 2008, maka yang terjadi jika tahun berikutnya dollar mengalami kenaikan, hal ini akan berdampak pada nilai utang Yunani dikarenakan nilai euro yang menurun, sementara ada beberapa utang yang di bayar menggunakan dollar. Untuk itu sebuah mata uang tunggal yakni euro memiliki resiko besar terhadap pertumbuhan perekonomian, dan setiap negara anggota harus dapat menyesuaikan serta mengendalikannya kebijakan moneter yang ada di *Zona Euro* agar dapat terhindar dari sebuah resesi ekonomi.

Kesimpulan

Dampak dari krisis finansial global dirasakan melalui penghentian dan pengurangan modal oleh investor untuk menghindari kerugian. Yunani yang mengandalkan aktivitas perekonomiannya dengan aliran modal dan investasi turut mempengaruhi krisis pada pinjamannya. Sementara itu pada tahun 2009 investor membuat perubahan harga dengan meningkatkan suku bunga pada obligasi Yunani. Hal ini akhirnya mempengaruhi peningkatan krisis utang tersebut di tahun 2009.

Bantuan luar negeri yang tidak dikelola secara produktif merupakan faktor lain dalam meningkatkan krisis utang Yunani. Sejak tahun 2008-2011 neraca transaksi berjalan Yunani mengalami penurunan drastis, akibat sebagian pinjaman yang dimiliki tidak dikelola untuk menghasilkan dana yang lebih menguntungkan. Dengan peningkatan utang yang terus meningkat dan dana yang terus mengering, akhirnya membuat Bank Sentral Eropa, Komisi Eropa, dan IMF (*Troika*) meminta Yunani untuk menerima dana talangan.

Adapun syarat dana talangan yang diberikan oleh Troika juga merupakan faktor lain terhadap jumlah utang Yunani. Syarat yang harus dipenuhi tersebut yakni adanya perubahan kebijakan yang membuat kondisi perekonomian Yunani justru semakin memburuk. Kondisi yang ditimbulkan atas perubahan kebijakan tersebut adalah privatisasi. Sebesar 6000 perusahaan BUMN harus dikurangi menjadi 2000 perusahaan seperti perbankan dan perkapalan pada akhirnya menimbulkan pengangguran besar. Pengangguran yang besar dengan tingkat konsumsi yang tinggi serta tidak adanya pendapatan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan Yunani untuk membayar utangnya. Jika utang tidak dapat terbayar maka beban bunga juga akan bertambah besar setiap tahunnya.

Namun krisis utang Yunani tidak akan mengalami peningkatan secara drastis apabila mata uang euro kuat. Hal ini telah dibuktikan pada tahun 2001-2007 setelah mengganti mata uang negaranya dengan euro, dimana jumlah utang Yunani masih dalam keadaan tingkat yang stabil bahkan pernah mengalami penurunan. Akan tetapi krisis global tahun 2008 menyebar ke Eropa dan membuat nilai euro melemah yang otomatis mempengaruhi nilai utang Yunani. Apabila euro masih dalam keadaan stabil, maka Yunani tidak akan mengalami krisis utang yang lebih dalam. Sehingga mata uang tunggal euro juga menjadi pemicu dalam peningkatan terhadap nilai utang Yunani.

Daftar Pustaka

- Assoc. Prof. Dr. Serdar Ozturk. 2015. *Effects Of Global Financial Crisis On Greece Economy*, <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212567115004414?token=10FADB8C547603C787D41C83AF5B933F9C77E53B5DC16804743B16BA8434A1F459FBA5140DDC3DDBA5B44CE41FF07F>
- Barrell. Ray, Sylvia Gottschalk, dan Dawn Holland. *The Impact Of EMU On Growth And Employment*, terdapat dalam http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication12412_en.pdf
- Battiston. S. 2013. *Capital And Contagion In Financial Networks*. Terdapat dalam <http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb39g.pdf>
- Chatziioannou C. Maria. 2013. *War, Crisis, And Sovereign Loans: The Greek War Of Independence And British Economic Expansion In The 1820s*. Terdapat dalam <https://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/13997/1/193.pdf>
- Doris A. Oberdabernig, 2017. *The Effect Of Structural Adjustment Programs On Poverty And Income Distribution*, terdapat dalam <https://wiiw.ac.at/the-effects-of-structural-adjustmen-programs-on-poverty-and-income-distribution-paper-dlp-2017.pdf>
- Dreher. Axel. 2004. *IMF And Economic Growth: The Effects Of Programs, Loans, And Compliance With Conditionally*, terdapat dalam <https://www.twi-kreuzlingen.ch/wp-content/uploads/2017/12/twi-rps-001-dreher-2004-11.pdf>
- Elena. Holandy. 2000. *The First Time Greece Defaulted Was More Than 2000 Years Ago*, terdapat dalam <https://www.thejournal.ie/interesting-facts-greece-economy-2181313-Jun2015/>
- Herz. Bernhard dan Angelos Kotios. 2000. *Coming Home To Europe: Greece And The Euro*, terdapat dalam <https://50years.intereconomics.eu/files/download/ie-artikel/herz-kotios-coming-home-to-europe-greece-and-the-euro.pdf>
- Jenkins. Adam. 2011. *Comitte On Capital Markets Regulation Financial Regulation, Systemic Risk, And The Adult Of Financial Contagion*, terdapat dalam http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/Prizes/2011.pdf
- J. Rosenau. 1969. *International Politics And Foreign Policy Resived Edition A Reader In Research And Theory*. The Free Press. New York
- Markantonataou. Maria. 2013. *Diagnosis, Treatment, And Effects Of The Crisis In Greece A Special Case Or A Test Case*. Terdapat dalam https://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp13-3.pdf
- Nelson. Rebecca. 2017. *The Greek Debt Crisis: Overview And Implications For The United States*. Terdapat dalam <https://fas.org/spg/crs/row/R44155.pdf>
- Phd Srdjan Furtula dan Phd Srdjan Sapic. 2017. *The Impact Of Global Financial Crisis On The EMU States*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/313319958_THE_IMPACT_OF_GLOBAL_FINANCIAL_CRISIS_ON_THE_EMU_STATES
- Podaras. Androniki. 2012. *The Greek Financial Crisis: An Overview Of The Crisis In Entirety And Proposed Measure: Recommended Solutions And Results*, terdapat dalam <https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?>
- Tetryatnikova. Mariya. 2014. *Systemic Risk In Banking Networks: Advantages Of "Tiered" Banking System*. Terdapat dalam <https://homepage.univie.ac.at/Mariya.Tetryanikova/Research/chapter%202.pdf>